
Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)

Theresa Mega Moku¹

Herman Nayoan²

Stefanus Sampe³

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian MenurutMardiasmo (2004 : 18), suatu pemerintahan yang baik (*goog governance*) meliputi : Participaton, Transparency, Respowiveness, Consensus of orientation dan Accountability. penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa dan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa.. berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa perlu adanya peran dari masyarakat yang ada, baik dari pedagang ataupun dari pengunjung pasar ini, karena pemerintah juga dalam pengembangan pasar ini perlu sumbangsi pemikiran dari masyarakat agar supaya ada inovasi untuk pengembangan pasar ini, karena tujuan dari pemberdayaan pasar tradisional yang ada di Langowan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langowan.Dalam hal ini pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, jika dilihat dari pemberdayaan pasar Langowan Timur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada, pemerintah tentunya harus melakukan pengembangan pada pasar ini, karena kegiatan ekonomi masyarakat Langowan berada pada pasar ini, jika pemerintah tidak melakukan pengembangan pada pasar ini, artinya pemerintah tidak mengutamakan kepentingan masyarakat yang bergantung hidup di pasar ini.Pasar tradisional merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk bisa di kembangkan, karena pasar tradisional sekarang bersaing dengan pasar modern. Tentunya dalam pengembangan pasar tradisional ini membutuhkan strategi yang jelas dan tepat dari pemerintah sendiri guna bisa menjawab setiap permasalahan yang ada dalam pengembangan pasar tradisional.

Kata Kunci: Pemerintah, Pemberdayaan, Pasar Tradisional

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional. Pasar tradisional mempunyai peran strategis dalam hal penyerapan tenaga kerja. Menurut data BPS (2018) menunjukkan bahwa “sektor ritel mampu menyerap 23,4 juta tenaga kerja atau sekitar 21,3% dari total tenaga kerja Indonesia. Dengan jumlah tersebut, penyerapan tenaga kerja di sektor ritel menempati urutan kedua setelah sektor pertanian yang menampung 39,3 juta tenaga kerja atau sekitar 35,8% dari total tenaga kerja Indonesia.

Kondisi pasar tradisional sebagian besar kotor dan kurang nyaman untuk berbelanja dimanfaatkan oleh para investor untuk membuat suatu konsep tempat belanja baru yang lebih baik dan nyaman. Pasar modern muncul sebagai konsep baru yang menawarkan alternatif tempat belanja selain di pasar tradisional. Dengan konsep dan fasilitas yang lebih baik, pasar modern akhirnya mampu menggeser pasar tradisional. Tempat belanja yang lebih bersih, pilihan barang yang menarik, fasilitas lengkap, keamanan lebih terjamin merupakan serangkaian kelebihan yang ditawarkan kepada pengunjung pasar modern dengan memanjakan dan memudahkan mereka pada saat berbelanja di pasar modern. Persaingan di antara keduanya pun tidak terhindari. Minimnya aturan zonasi dari pembangunan pasar modern, maka pasar tradisional yang berada di kota-kota besar terkena imbasnya.

Persaingan head to head akibat menjamurnya pasar modern membawa dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional. Salah satu dampak nyata dari kehadiran pasar modern di tengah-tengah pasar tradisional adalah

turunnya pendapatan terhadap pedagang pasar setiap harinya. Emiliana (2011) “Pasar tradisional kalah bersaing dengan pasar modern disebabkan masyarakat lebih memilih berbelanja di toko modern. Hal ini dapat dilihat dari toko-toko modern yang lebih nyaman dengan pelayanan mandiri dan modern dibandingkan dengan pasar tradisional.

Pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Untuk menegaskan Perpres nomor 112 tahun 2007, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern

Melihat fenomena yang terjadi, bahwa kebersihan di pasar Langowan mulai di abaikan oleh pemerintah setempat, sehingga banyak sampah yang tertumpuk dan menimbulkan bau busuk di sekitaran pasar Langowan yang ada. Berikut juga infrastruktur yang mulai di abaikan sehingga membuat masyarakat yang mengunjungi pasar tersebut merasa kurang nyaman akan fasilitas yang ada. Hal ini di sebabkan juga karena kesadaran masyarakat yang kurang baik, berupa tidak menjaga pasar yang ada dan tidak memperhatikan kebersihan pasar.

Hal ini juga sebenarnya menjadi tugas penting dari pemerintah yang ada, agar supaya menyadarkan masyarakat akan kebersihan dan kondisi pasar, dan juga pemerintah harus memperhatikan fasilitas yang ada, agar supaya pasar – pasar tradisional bisa tertata dengan rapih dan masyarakat bisa nyaman, ketika di kunjungi oleh masyarakat yang ada. Jika dilihat dari masalah tersebut bahwa pasar tradisional mulai ada persaingan dengan pasar modern, maka di takutkan pasar tradisional ini akan kurang di minati oleh masyarakat yang ada, sedangkan selama ini pasar tradisional sangat dibutuhkan oleh masyarakat Langowan karena pasar tersebut merupakan salah satu tempat

yang di di jadikan sebagai tempat perputaran ekonomi yang ada di Langowan dan juga sebagai aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Dan juga Pasar langowan ini banyak masyarakat yang bergantung ataupun mencari nafkah, itu artinya pasar tradisonal ini menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langowan. Namun ketika pasar Langowan ini tidak bisa berkembang dengan baik dan juga ada beberapa masalah di dalamnya, itu akan mengakibatkan tingkat dan kontribusi pasar Langowan ini bisa berkurang dan tidak bisa membantu masyarakat lagi, pada segi perekonomian terutama yang ada di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur

Tinjauan Pustaka Konsep Tentang Peran Pemerintah Pengertian Peran

Menurut Nye, 1976 dalam (Andarmoyo, 2012) Peran menunjuk kepada beberapa set perilaku yang kurang lebih bersifat homogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara normative dari seseorang okupan dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada preskripsi dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut (Andarmoyo, 2012).

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008). Peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar

(masyarakat luas), setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu.

Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran ,dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut (Momon Sudarman,2008).

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran

Menurut Kurniawan (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran serta meliputi:

1. Kelas sosial, fungsi dari peran suami tertentu dipengaruhi oleh tuntutan kepentingan dan kebutuhan yang ada dalam keluarga.
2. Bentuk keluarga, keluarga dengan orang tua tunggal jelas berbeda dengan orang tua yang masih lenkap demikian juga antara keluarga inti dengan keluarga besar yang beragam dalam pengambilan keputusan dan kepentingan akan rawan konflik peran.
3. Latar belakang keluarga
 - a. Kesadaran dan Kebiasaan, keluarga Kesadaran merupakan titik temu atau equilibrium dari berbagai pertumbuhan dan perbandingan yang menghasilkan keyakinan. Kebiasaan yang meningkatkan kesehatan yaitu : tidur teratur, sarapan setiap hari, tidak merokok, tidak minum-minuman keras, tidak makan sembarangan, olahraga, pengontrolan berat badan.
 - b. Sumber daya atau pendapatan keluarga merupakan penerimaan seseorang sebagai imbalan atas semua yang telah dilakukan tenaga atau pikiran seseorang terhadap orang lain atau organisasi lain.
 - c. Siklus Keluarga, sesuai dengan fungsi keluarga yang sedang dialami juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi peran karena perbedaan kebutuhan dan kepentingan. Didalam siklus keluarga peran anggota berbeda misalnya ibu berperan sebagai asuh, asah dan asih, ayah sebagai pencari nafkah dan anak tugasnya belajar dan menuntut ilmu.

4. Pengetahuan, menurut Notoatmojo (2007), Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behavior). Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan tinggi tentang obyek tertentu menyebabkan seseorang dapat berfikir rasional dan mengambil keputusan

Peran Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243).

Tinjauan tentang Pemberdayaan Pengertian Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapat akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting. Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan pada dasarnya dibangun dari ide yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Terdapat dua kecenderungan proses pemberdayaan yaitu pertama adalah proses pemberdayaan yang menekankan ke proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada

masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang kedua adalah lebih menekankan melalui proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya (Kartasasmita, 1996).

Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu menentukan kebutuhan serta menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Komponen utama pemberdayaan dalam hal ini adalah kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atau kendali dalam menentukan kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan (Samah dan Aref, 2009).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Subejo dan Narimo (2004) dalam Mardikanto dan Soebiato (2015) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Kusumahadi (2007) dalam Sutawa (2012) menyatakan bahwa program pembangunan dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke sumber-sumber daya, terpenuhinya kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan memiliki kemampuan untuk

melakukan kontrol sosial terhadap aspek lingkungan.

2. Pengembangan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengelola organisasi lokal (self-management).
3. Pengembangan pemikiran kritis masyarakat agar mereka memiliki pemikiran yang lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumber daya tersebut. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan diperlukan untuk menjaga agar manfaat dari sumber daya alam tersebut dapat dirasakan secara terus menerus pada generasi yang akan datang untuk memperbaiki mutu atau kualitas hidup manusia (Mardikanto dan Soebiato, 2015). Beberapa manfaat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam antara lain membantu mengurangi kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan, dan mengatasi konflik pengelolaan sumber daya di antara para pihak yang berkepentingan (Kullenberg, 2010).

Pemberdayaan juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis (Supriyanto, 2005).

Konsep Mengenai Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan

memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.

Pasar Tradisional

Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, Pasar didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual-beli (Majid, 1988). Pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Saat ini pasar dikenal dengan adanya pasar tradisional dan pasar modern. Keberadaan pasar tradisional sangat besar manfaatnya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan berkala atau kebutuhan sandang dan pangan juga sebagai sarana penunjang kemajuan perekonomian Negara. Di pasar tradisional terdapat banyak jenis komoditas yang diperjual-belikan biasanya adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti sayuran, sembako, pakaian, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya.

Boeke (1910) merupakan salah satu ahli ekonomi yang mencoba menerangkan fenomena terbentuknya

pasar dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik. Menurutnya, “perbedaan yang paling mendasar antara masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik terletak dalam hal orientasi kegiatan ekonominya. Masyarakat dalam tingkatan prakapitalistik berupaya untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang diperolehnya, sedangkan masyarakat dalam tingkatan kapitalistik tinggi berupaya untuk mendapatkan laba maksimum”.

Sastradipoera (2006), “Perbedaan orientasi ekonomi tersebut melahirkan nilai-nilai sosial dan budaya yang membentuk pemahaman terhadap keberadaan pasar dalam kedua kategori masyarakat tersebut. Dalam masyarakat kapitalistik, individu secara otonom menentukan keputusan bebas.

Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kesejahteraan

merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, makaseseorang sudah dinilai sejahtera , karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata, dkk 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2013). Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera.

Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of income) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Dwi 2008 diacu oleh Widyastuti 2012).

Edi. Suharto (2014) Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan kesejahteraan, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera.
5. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan strategi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.
Informan adalah orang yang dipakai dalam penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi mengenai fokus penelitian ini. Informan yang digunakan pada penelitian ini antara lain:
 1. PD Pasar Langowan
 2. Pedagang Pasar Langowan (2 Orang)
 3. Pengunjung Pasar Langowan (2 Orang)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian Menurut Mardiasmo (2004 : 18), suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi :

1. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.
2. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
3. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
4. *Consensus of orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Langowan Timur guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat maka pembahasan dalam penelitian ini akan di analisis berdasarkan lima aspek fokus penelitian dengan melihat suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut mardiasmo (2004-18), sebagai berikut :

1. *Participation*. Dimana penulis akan melihat ketelibatan masyarakat dalam suatu tatanan pemerintahan, terlebih khusus pada peran pemerintah dalam pemberdayaan pasar Tradisional di Langowan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya dalam pengembangan pasar Tradisional Langowan ini, perlu adanya peran dari masyarakat yang ada, baik dari pedagang ataupun dari pengunjung pasar ini, karena pemerintah juga dalam pengembangan pasar ini perlu sumbangsi pemikiran dari masyarakat agar supaya ada inovasi untuk pengembangan pasar ini. Namun nyatanya yang terjadi di lapangan, yaitu belum terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga proses pengembangan pasar Tradisional ini belum berjalan dengan baik. Akibatnya sarana dan prasarana pasar Langowan masih jauh dari

harapan, belum lagi masalah persampahan yang tidak bisa di kelola dengan baik sehingga menimbulkan bau yang tidak enak untuk di cium, hal ini tentunya sangat mengganggu pengunjung bahkan pedagang yang ada. Kalau saja komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat berjalan dengan baik, tentunya masalah – masalah seperti ini bisa dibicarakan dengan baik dan tentunya dapat menemukan jalan keluar. Hal ini yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah, yaitu peran aktif dari masyarakat untuk bisa mengembangkan pasar tradisional yang ada di Langowan. Karena keberhasilan dari suatu pemerintahan tentunya harus ada partisipasi yang lebih dari masyarakat, baik dari pengambilan keputusan, tindakan, maupun kebijakan. Karena sejatinya ketika masyarakat punya partisipasi lebih kepada pemerintah dalam melakukan tindakan itu juga bisa mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal ini juga pemerintah harus berperan aktif pada masyarakat untuk bisa mengajak dan menyadarkan masyarakat yang ada, untuk bisa sama-sama mengembangkan pasar ini. Yang harus dilakukan pemerintah tentunya melaksanakan pembinaan untuk masyarakat, memberikan tindakan yang nyata (apa yang di perlukan masyarakat) agar supaya pemerintah yang ada, bisa di percaya oleh rakyatnya.

2. *Transparency*. Transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Tujuan dari hal ini adalah untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan public dimana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi public yang membutuhkan. Terkait hal ini transparansi yang dibutuhkan yaitu untuk bisa mengetahui hal apa saja yang menjadi tugas pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional

Langowan ini, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Sesuai hasil penelitian yang di dapati bahwa pemerintah harus melakukan penyusunan program kegiatan di bidang pasar tujuannya untuk mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan pekerjaan yang di capai. Melihat hal itu tentunya pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar agar supaya bisa mengembangkan pasar tradisional, namun nyatanya program yang tekah di susun oleh pemerintah hanya sebatas program saja dan tidak berjalan dengan baik, buktinya saja bahwa pemerintah akan memberikan fasilitas bagi para pedagang yang ada, namun ternyata masih banyak pedagang yang tidak mendapat tempat untuk berjualan sehingga di Pasar Langowan ini banyak pedagang liar yang sudah memakai jalan untuk para pengunjung. Ada juga salah satu bentuk kegiatan tersebut dengan melakukan sosialisasi tentang pengembangan pasar tapi hal tersebut masih jauh dari harapan, karena sampai saat ini juga pemerintah sendiri belum melakukan kegiatan tersebut. Melakukan survey ke lapangan untuk bisa mengetahui hal apa saja yang kurang pada pasar ini, kami juga melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar, penyelenggaraan kemitraan pedagang, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. Melakukan pendaftaran dan pendataan pedagang, serta penetapan dan penagihan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, karena dari biaya retribusi tersebut, kami bisa melakukan pembangunan pada pasar tersebut. Kami juga melakukan pembinaan penyuluhan pedagang, keamanan dan ketetapan pedagang, dan juga melakukan penataan pedagang. Itu semua bentuk nyata kami sebagai dinas terkait dalam pengembangan pasar Langowan, kalau masih di dapati di lapangan ada kesalahan kecil, kami juga akan terus berkoordinasi dengan

pemerintah daerah, agar supaya pengembangan pasar tradisional ini bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Itu semua merupakan tugas dari pemerintah yang ada, guna bisa mengembangkan pasar tradisional ini. Namun sampai saat ini, belum terlaksana dengan baik, padahal hal tersebut sangat di harapkan oleh masyarakat, baik pengunjung maupun para pedagang, jika tugas dan tanggung jawab pemerintah itu bisa berjalan dengan, pasar Tradisional ini bisa berkembang dengan baik dan setiap masalah dan keluhan yang ada, bisa di atasi. Dan tentunya pasar ini bisa menjadi tempat yang nyaman dan tentunya bisa menguntungkan semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat dan pedagang.

3. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani. Hal ini adalah indikator terpenting dalam mensukseskan pengembangan pasar tradisional, yang dimana pemerintah yang ada dituntut agar supaya cepat merespon setiap permasalahan yang ada dalam pengembangan pasar tradisional ini. Salah satu hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah yaitu harus memperhatikan dan menjalankan setiap program yang telah di rencanakan untuk bisa mengembangkan pasar tradisional Langowan. Artinya begitu banyak program dan inovasi yang telah di atur namun belum semua di eksekusi. Seperti program pembinaan kepada setiap pedagang yang tujuan untuk bisa mengelola pasar ini dengan baik, namun belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini membawah dampak yang buruk dan mengakibatkan pasar ini tidak bisa berkembang dengan baik. Hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah terutama dinas terkait. Adapun hal yang belum bisa di respon cepat oleh pemerintah, yaitu mengenai sarana dan prasarana yang kurang, yang menjadi keluhan kesah masyarakat dan

pedagang, karena hal ini yang menjadi masalah utama pada pasar Langowan, dimana kurangnya fasilitas untuk berdagang sehingga banyak pedagang liar dan tidak dapat di atur dengan baik oleh pengelola pasar Langowan. Belum lagi masalah kebersihan pasar ini, yang jika di biarkan, akan berdampak pada kesehatan masyarakat, dan tentunya mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung pasar Langowan. Seharusnya masalah-masalah umum seperti ini bisa di atasi oleh pemerintah yang ada, namun karena respon pemerintah yang lambat sehingga masalah seperti ini tidak bisa terjawabkan dengan baik.

4. *Consensus of orientation*. Dimana pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Jika dilihat dari pengembangan pasar tradisional Langowan, pemerintah tentunya harus melakukan pengembangan pada pasar ini, karena kegiatan ekonomi masyarakat Langowan berada pada pasar ini, jika pemerintah tidak melakukan pengembangan pada pasar ini, artinya pemerintah tidak mengutamakan kepentingan masyarakat yang bergantung hidup di pasar ini. Karena pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli barang bagi masyarakat, dan pasar juga merupakan salah satu cerminan perekonomian dan sosial budaya setiap komunitas masyarakat yang ada. Seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu pasar mengalami evolusi bentuk tempat dan juga cara pengelolaannya, dari yang bersifat tradisional sampai modern. Perkembangan pasar di dunia saat ini mulai mengalami perubahan, dari pasar tradisional menjadi pasar-pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya terjadi proses tawar menawar. Pasar tradisional identik dengan toko klontong, kios-kios, dan juga pedagang eceran kebutuhan pokok seperti bahan makanan, buah,

sayur-sayuran telur, daging dan juga pakaian. Pasar tradisional di seluruh Indonesia secara bertahap menghadapi serangan dari pasar modern. Keberadaan pasar tradisional di era modern masih di butuhkan, karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami manfaat dari perkembangan ilmu dan teknologi. Misalnya berbelanja melalui internet. Sampai saat ini pasar tradisional masih dominan dan di butuhkan keberadaannya untuk masyarakat menengah ke bawah. Mengapa demikian karena pembeli selalu menginginkan barang-barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Itulah peran pasar tradisional yang masih bisa menggunakan sistem tawar-menawar. Namun masalah yang terjadi sekarang pasar tradisional mulai tergeser oleh maraknya pembangunan pasar-pasar modern seperti mini market, hypermarket bahkan supermarket yang sarana dan prasarannya jauh lebih baik dari pada pasar tradisional. Dengan adanya keberadaan pasar-pasar modern seperti mini market, hypermarket bahkan supermarket mengakibatkan daya tarik masyarakat berkurang untuk berbelanja di pasar tradisional. Hal ini dikarenakan pasar tradisional kebanyakan terkesan : pertama, pasar tradisional tidak jarang berlokasi kumuh, bau, kotor, semprawut, sehingga membuat ketidaknyamanan, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan jual beli. Kedua, pedagang pasar tradisional membeli barang lebih mahal di bandingkan dengan pengusaha ritel modern. Hal ini menyebabkan pedagang pasar tradisional menjual barang dagangannya lebih mahal. Ketiga, keterbatasan stok barang membuat pedagang pasar tradisional kalah saing dengan pasar-pasar modern seperti mini market, hypermarket bahkan supermarket yang mempunyai modal lebih besar dan menyediakan stok barang yang banyak, bahkan bisa untuk tiga bulan

ke depan. Tiga hal itu turut menjadi jurang pembedaan dari pedagang pasar tradisional dengan ritel modern, dan juga kita bisa lihat dan perhatikan pasar tradisional yang ada itu sering kali dalam kondisi kurang higienis dan kurang nyaman. Masyarakat saat ini berbelanja kebanyakan lebih mengedepankan kebersihan dan kenyamanan saat berbelanja. Dari masalah – masalah tersebut, sebenarnya harus menjadi perhatian khusus untuk pemerintah agar bisa mengembangkan pasar tradisional, karena itu merupakan bukti nyata bahwa masyarakat masih membutuhkan pasar tradisional yang ada. Dari hal tersebut, ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengembangan, agar supaya pasar tradisional masih bisa bertahan dan bisa bersaing dengan pasar-pasar modern.

5. *Accountability*. Merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan strategi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Pasar tradisional merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk bisa di kembangkan, karena pasar tradisional sekarang bersaing dengan pasar modern. Tentunya dalam pengembangan pasar tradisional ini membutuhkan strategi yang jelas dan tepat dari pemerintah sendiri guna bisa menjawab setiap permasalahan yang ada dalam pengembangan pasar tradisional. Sampai saat ini bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengembangan pasar tradisional masih di anggap kurang peduli, buktinya saja masih ada permasalahan yang di dapati pada pasar tradisional ini. Padahal masalah tersebut bisa selesai dan terjawabkan dengan baik, ketika pemerintah dapat menjalankan program kerja yang telah disusun dengan baik. Seperti program pembinaan para pedagang, melaksanakan pembangunan dan pengembangan pada pasar,

melakukan monitoring, dan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi pasar tradisional ini. Karena ketika pasar tradisional tidak bisa di kembangkan dengan baik, maka akan terjadi persaingan dengan pasar – pasar modern, dan ketika pasar modern lebih di minati oleh masyarakat, tentunya akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Karena pasar modern banyak di kelola oleh para pengusaha yang aslinya bukan masyarakat asli pribumi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus untuk pemerintah agar dapat mengembangkan pasar tradisional ini, karena banyak masyarakat asli pribumi yang bergantung hidup pada pasar – pasar tradisional. Tentunya juga, jika pemerintah tidak melakukan pengembangan pada pasar tradisional ini, maka pemerintah dinilai gagal dalam mengutamakan kepentingan rakyatnya. Solusi yang terpenting dalam pengembangan pasar ini, yaitu pemerintah harus mempunyai strategi yang jelas dan baik, agar supaya setiap permasalahan yang ada, bisa terselesaikan dengan baik. Karena hal yang paling di takutkan ketika pemerintah tidak mengembangkan pasar tradisional ini, maka pasar modern akan lebih di minati oleh masyarakat dan resiko yang paling buruk, yaitu pasar tradisional akan hilang karena tidak mampu bersaing dengan pasar modern.

Penutup

Kesimpulan

Terkait hal ini transparansi yang dibutuhkan yaitu untuk bisa mengetahui hal apa saja yang menjadi tugas pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional Langowan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Sesuai hasil penelitian yang di dapati bahwa pemerintah harus melakukan penyusunan program kegiatan di bidang pasar tujuannya untuk mengetahui secara rinci tindakan-tindakan untuk dapat

memberdayakan pasar Langowan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini adalah indikator terpenting dalam mensukseskan pemberdayaan pasar tradisional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Langowan, yang dimana pemerintah yang ada dituntut agar supaya cepat merespon setiap permasalahan yang ada dalam pemberdayaan pasar tradisional ini. Salah satu hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah yaitu harus memperhatikan dan menjalankan setiap program yang telah di rencanakan untuk bisa memberdayakan pasar tradisional Langowan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya begitu banyak program dan inovasi yang telah di atur namun belum semua di eksekusi

Saran

Dalam rangka meningkatkan Disarankan untuk pemerintah dalam melakukan pemberdayaan pasar tradisional Langowan, harus lebih aktif lagi untuk bisa menyadarkan masyarakat agar bisa sama-sama memberdayakan pasar Tradisional ini. Dan masyarakat juga harus mengambil peran dalam pemberdayaan pasar tradisional ini, karena pemberdayaan pasar Langowan yang di lakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada.

Pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional ini, harus lebih transparansi lagi, baik dari program-program yang telah di susun, agar supaya masyarakat dan pedagang bisa mengetahui strategi pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional Langowan, dan masyarakat mampu mendorong program – program pemerintah yang ada, dalam pemberdayaan pasar tradisional Langowan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Astarhadi. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Imron. 2012. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anwas, Oos M, 2014. Pemberdayaan Masyarakat di era global. Bandung: Alfabeta.
- Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dani, H. (2006). Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Gita Media Press.
- Edi Suharto, 2014, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial), PT.Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Haryanto. (2000). Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah, Jakarta EGC.
- Hadari Nawawi, H. Murni Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, cet . 2, 1966).
- Swasono, 2004, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke the End of Laissez Faire, Jakarta: Bappenas.
- Sampe, stefanus, 2019. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Invertasi. Manado : Jurnal Eksekutif. Fispol Unsrat.
- Sunarti E. 2012. Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM.
- Suharto. Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- T. Guritnno, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi, (Jakarta:1992). Cet. Ke II.h.76.
- Wardatul Asriyah. "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi masyarakat Melalui Usaha",Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah 2007.
- Waworundeng welly, 2018. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Masyarakat. Manado : Jurnal Eksekutif. Fispol Unsrat.
- Yandianto (2000:282). Kamus Standar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka